

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

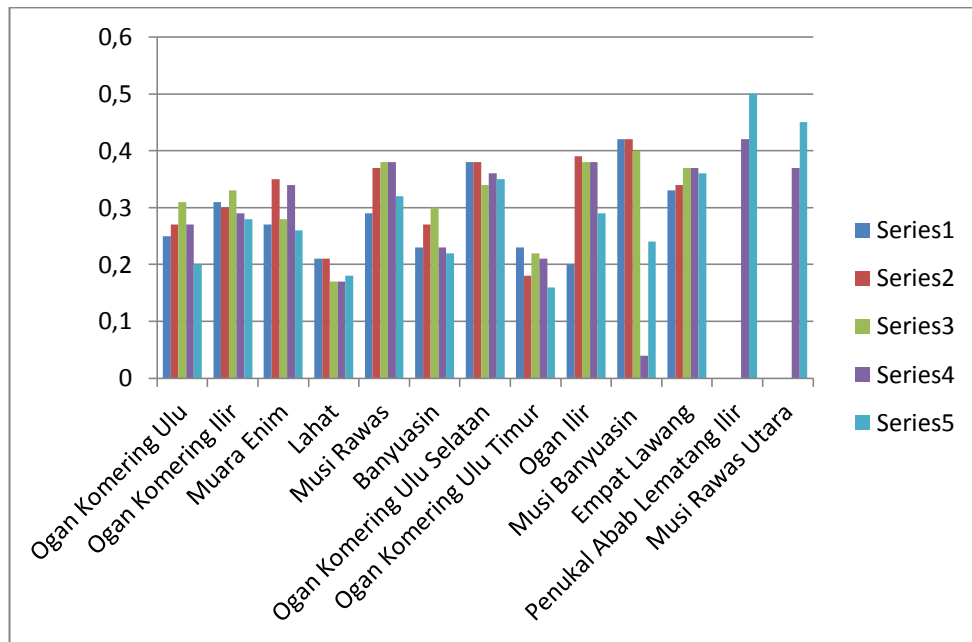
Undang Undang tersebut juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, di arahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur. Faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi anggaran aparatur masih jauh lebih besar dari pada anggaran untuk rakyat misalnya anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil daripada belanja pegawai.

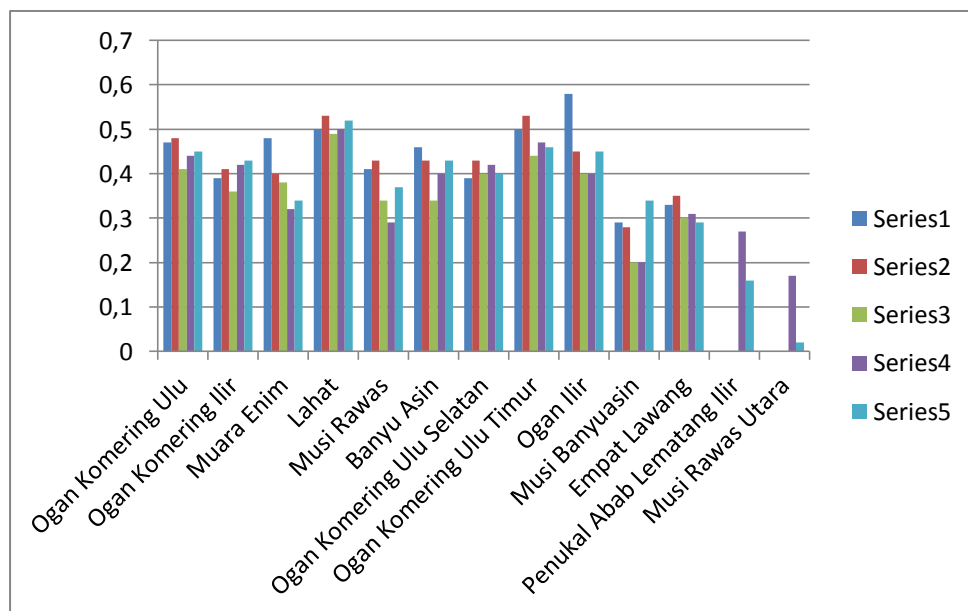
Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Pentingnya mengamati berapa proporsi gaji guru dalam Belanja Pegawai adalah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD.

Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Persoalan yang terjadi adalah masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal seharusnya lebih besar, kenyataannya dalam data Kemendagri anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih besar. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil.



Grafik 1.1
Belanja Modal

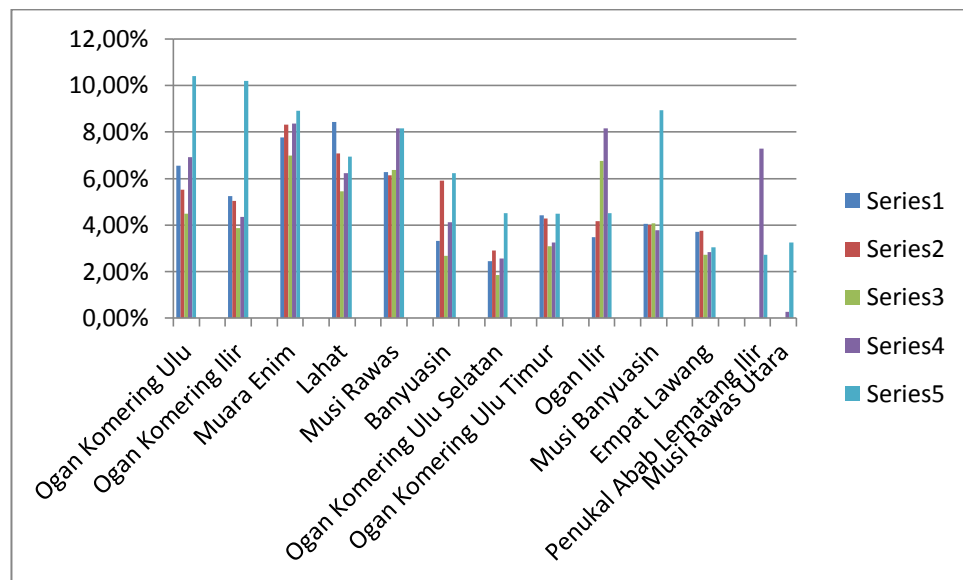


Grafik 1.2
Belanja Pegawai

Berdasarkan Grafik dari 13 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan diperoleh 9 Kabupaten yang memenuhi syarat dalam penelitian ini yang di

sajikan pada tabel diatas, yang dimana Kabupaten – Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu,Ogan Komering Ilir,Muara Enim,Lahat,Musi Rawas,Banyuasin,Ogan Komering Ulu Selatan,Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Ilir.

Dari grafik diatas dilihat bahwasannya Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2011-2015 memiliki persentase yang dimana alokasi Belanja Pegawai lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Modal dimana belanja modal yang bersentuhan dengan publik. Masalah yang terjadi adalah masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal seharusnya lebih besar, kenyataanya dalam data Kemendagri anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih besar. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Pada grafik belanja modal dan belanja pegawai dapat dilihat bahwa grafik yang terjadi mengalami ketidak stabilan. Untuk mengetahui tingkat presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Dearah dapat dilihat dari Grafik 1.3 sebagai berikut:



Grafik 1.3
Presentase Tingkat Kemandirian Kabupaten Sumatera Selatan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan memiliki Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang sangat rendah sekali dapat dilihat dari persentase yang tersaji diatas dan Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Ilir, dimana tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten tersebut , karena Rasio Kemandiriannya dibawah 0-25% sehingga penulis ingin membahas tentang mengapa tingkat kemandirian di Kabupaten tersebut tergolong Rendah Sekali.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai secara Simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apakah belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan tujuannya untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya belanja modal dan pegawai di Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti dan menganalisis :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai secara silmultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi untuk Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya Jurusan Akuntansi prodi Akuntansi Sektor Publik di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.